

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA
BANJARMASIN UTARA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR**

Muhammad Nahli Fikry Rasfirullah¹, Muthia Septarina², Nahdhah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NPM 18.81.0283

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1118098401

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1119028602
Email : nahlifikry00@gmail.com

Abstrak

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Banjarmasin Utara karena anak adalah tunas harapan, dan generasi penerus cita-cita bangsa serta memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan dan di masa yang akan datang, kriteria anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 adalah Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga Anak yang memiliki orang tua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak -anak menjadi bagian dari keluarganya. Mereka “terlempar” dari sistem sosial karena berbagai alasan seperti berbagai macam alasan seperti penelantaran atau tindakan kekerasan dan lainnya, semua ini terjadi karena keluarga tidak mampu lagi menjalankan peran dan fungsinya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat mendapatkan, melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dalam menangani masalah anak yang terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun dari perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia

yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Hasil penelitian ini bahwa Pemerintah Bekerja sama dengan dinas DP3A dalam menjalankan perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar dinas ini berperan dalam pencegahan, pendampingan bagi anak terlantar dengan memberikan sosialisasi kepada semua lini lingkungan masyarakat agar memahami dan memiliki konsep yang sama dalam memenuhi hak anak. Kendala yang dihadapi DP3A dalam menangani masalah anak terlantar adalah faktor ekonomi masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan juga mindset masyarakat sendiri yang dimana mindset yang ingin mendapatkan uang secara instant sehingga membiarkan atau mengizinkan si anak turun kejalanan untuk mengemis sehingga anak yang belum waktunya untuk mencari uang dibiarkan mencari uang kejalanan dengan meminta-minta guna membantu perekonomian keluarga sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak.

Kata kunci : *Pengertian Anak, Pengertian Anak Terlantar, Perlindungan Anak*

Abstract

Efforts to provide protection for abandoned children in North Banjarmasin City because children are the buds of hope, and the next generation of the nation's ideals and have a very important role in ensuring of aspirations for the sustainability of the nation and state in the future. The criteria for abandoned children according to the Banjarmasin City Regulation Number 6 of 2017 are children who no longer have parents and families, but do not have the ability to take care of, maintain, and meet the basic needs of children, children whose whereabouts are unknown parents and their families but in reality, not all children become part of the family. They are "thrown out" from the social system for various reasons such as neglect or acts of violence and others, all of this happens because the family is no longer able to carry out its roles and functions. This research focuses on two problem formulations, namely, how to protect the rights of neglected children according to the Banjarmasin City Regulation Number 6 of 2017 concerning the protection of neglected children and how the obstacles faced by the Office of Women and Children Empowerment (DP3A) in dealing with the problem of children being neglected. This study uses empirical research methods, this study uses empirical facts taken from human behavior, both verbal Behavior obtained from interviews and from real behavior that is directly observed. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. The results of this study show that the Government cooperates with the DP3A service in carrying out regional regulations Number 6 of 2017 concerning the protection of neglected children. This service plays a role in preventing, neglected children by providing socialization to assistance for children from all walks of life in order to understand and have the same concept in fulfilling their rights. child. The obstacles faced by DP3A in dealing with the problem of neglected children are the economic factors of

the community who cannot meet the needs of their children and also the mindset of the community itself which is the mindset that wants to get money instantly so that they let or allow the child to go out on the streets to beg so that children who havenot had the time to look for money is left looking for money on the street by begging to help the family economy, resulting in the non- fulfillment of their rights as children.

Keyword : *Understanding of children, Understanding of abandoned Children, Child protection.*

DAFTAR PUSTAKA

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber anak pada tanggal 21 april.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & dan Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasil wawancara Ibu Rimalia Kabid perlindungan khusus anak pada hari kamis tanggal 21 juli.

Hasil wawancara Ibu Mira staff anggota bidang pemenuhan hak anak DP3A pada tanggal 23 juli.

Hasil wawancara Ibu Mira staff anggota bidang pemenuhan hak anak DP3A pada tanggal 23 juli.

Hasil wawancara Bapak Rasyidi staff anggota bidang pemenuhan hak anak DP3A pada tanggal 23 juli.

Hasil wawancara Ibu Rimalia Kabid perlindungan khusus anak pada hari kamis tanggal 21 juli.